



PT PP PROPERTI Tbk

Plaza PP - Lt. 7
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo - Jakarta 13760
Telepon : (021) 8779 2734
Fax : (021) 8779 2947
E-mail : headoffice@pp-properti.com

Jakarta, 12 April 2019

Nomor : 394/EXT/PP-PROP/2018
Lampiran : Bukti Iklan

Kepada:

- **Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I**
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170
- **Yth. Direksi**
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung BEI, Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan**

Dengan hormat,

Bersama Surat ini kami sampaikan Bukti Pemasangan Iklan **Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Tahun Buku 2018 PT PP Properti Tbk** yang dimuat pada 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu *Investor Daily* Hal. 25 dan *Bisnis Indonesia* Hal. 11 pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT PP Properti Tbk


M. INDARYANTO
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa, OJK;
2. Yth. Kepala Divisi Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate, OJK;
3. Yth Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT BSR Indonesia
6. Arsip.

7 AGRIBUSINESS INVESTOR DAILY

Upah Pekerja Kerek Biaya Produksi CPO

Oleh Damiana Simanjuntak

JAKARTA - Biaya produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) masih akan menjadi momok bagi industri sawit nasional dalam 10 tahun ke depan. Pasalnya, biaya tenaga kerja terus melonjak akibat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) rata-rata 10% setiap tahunnya. Biaya produksi CPO yang dikeluarkan perusahaan sawit di Indonesia pada 2017 berkisar US\$ 444-577 per ton.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, sejak 2008-2017 Compound Annual Growth Rate (CAGR) harga CPO hanya naik 1,50%, sedangkan biaya produksi naik 4,90%. Sementara itu, berdasarkan pantauan atas sejumlah perusahaan sawit nasional, per semester 1-2017, biaya produksi CPO berkisar US\$ 444-577 per ton, padahal perusahaan di Malaysia hanya menanggung biaya produksi US\$ 329-396 per ton CPO.

Joko Supriyono mengatakan, tren harga CPO di pasaran cenderung tidak berubah, hal itu ditunjukkan dengan pola fluktuasi harga yang dalam lima dekade terakhir tetap sama, yang berbeda adalah biaya produksinya. "GPO Indonesia itu menghadapi kenaikan biaya produksi akibat kenaikan UMP yang berkisar rata-rata 10% per tahun. Masalahnya, produktivitas sawit Indonesia naik? Tidak, ini menjadi tantangan," kata Joko Supriyono di Jakarta, Kamis (11/4).

Untuk itu, lanjut Joko, produktivitas sawit nasional harus dipacu. Saat ini, rata-rata produktivitas CPO nasional baru sekitar 4 ton per hektare (ha). Dengan asumsi menggunakan peralatan harga misalnya Rp 7.000 per kilogram (kg) CPO untuk tahun dasar 2017 maka dalam 10 tahun ke depan untuk mengantisipasi kenaikan biaya produksi sudah seharusnya produktivitas dipacu menjadi 6,50 ton per ha. "Jika produktivitas tidak naik, industri kelapa sawit akan menciut," kata Joko.

Selain harga dan biaya produksi, tantangan lain yang dihadapi industri sawit nasional adalah hambatan perdagangan di sejumlah negara. Untuk mengantisipasi tantangan-tantangan itu maka industri sawit nasional harus fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri. Pengembangan pasar dan produk juga perlu digalakan, berperan memenangkan pasar, baik dengan kampanye positif maupun pengaitan perdagangan. "Kalau bagus bisa dengan trade agreement yang baik. Kalau tidak baik, berenergi perang, kalau Indonesia dengan Eropa ini belum pernah, baru ancam mengancam. Agak tahu apakah Indonesia berani perang atau tidak, kita lihat saja," kata dia.

Pada akhirnya, kelapa sawit hanya menyangkut produktivitas dan mengelola biaya produksi seefisien mungkin. Terkai biaya produksi memang harus dikelola agar naiknya tidak sampai berlebihan. "Kembali, agribisnis harus. Untuk itu butuh usaha dan inovasi teknologi untuk efisiensi itu. Di sisi lain, harga sama sekali tidak bisa dikontrol, yang bisa itu mengelola stok," kata Joko.

Produksi CPO Dia menurunkan, pada 2018 produksi minyak sawit Indonesia (CPO dan CPKO) melampaui 47 juta ton atau melonjak sekitar 11,70% dari 2017 yang tercatat 42,0 juta ton. Pada 2019, produksi kemungkinan hanya naik 2-5,5 juta ton. "itu kondisi normal. Apalagi, tahun ini diperkirakan ada El Nino ringan yang dapat atau berpotensi muncula pematangan buah. Hal ini sudah mulai terjadi di Sumatera dan Kalimantan Selatan," jelas Joko.

Pada saat bersamaan, lanjut Joko Supriyono, konsumsi minyak sawit domestik harus di naikan, baik dengan program biodiesel 20% (B20, B30, B50, atau B100). Yang jelas, pasokan minyak sawit harus dikelola. "Kita harus mengendalikannya sebagai inventory ke dalam negeri, ini untuk menghindari pertarungan sengit di pasar global. Apakah harga akan naik? Belum tentu. Tapi, dengan mengendalikan sebagian inventory, kita bisa menekan over stock," kata Joko.

Dalam catatan Gapki, stok akhir minyak sawit Indonesia pada Februari 2019 tercatat tinggal 2,50 juta ton atau lebih rendah dari stok akhir Januari 2019 yang sebesar 3,02 juta ton. Penurunan stok ini turut berperan terhadap naiknya harga CPO di pasar global. "Penurunan stok minyak sawit juga terjadi di Malaysia dan minyak nabati lainnya di negara produsen," kata Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono. Memasuki Februari tahun 2019, kenaikan harga rata-rata bulanan CPO sebesar 5% atau dari US\$ 530,70 per ton. Sepanjang Februari 2019, harga CPO global bergerak pada kisaran US\$ 442,50-572,50 per ton.



PROPERTI

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PP PROPERTI Tbk

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Hari/Tanggal: Rabu, 10 April 2019
Waktu: Pukul 09.00 WIB s.d 11.15 WIB
Tempat: PT PP Properti Tbk, Plaza PP - Auditorium Wisma Subyarto Lantai 1, J. Lejend, TB, Satepung No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760

- Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Peninjauan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Peninjauan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Peninjauan Laporan Tahunan 2019, meliputi data dan informasi honorarium untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
5. Laporan Realisasi Penganggaran Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Oligasi Berkelanjutan PP Properti Tahap I Tahun 2018.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
7. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

- DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama: Ir. Lukman Hidayat
Komisaris: Betty Aritua
Komisaris Independen: Mohammad Farida
Komisaris Independen: Kelik Wirawan Wahyu Widodo

- DIREKSI:
Direktur Utama: Taufik Hidayat
Direktur: Indaryanto
Direktur: Gahm Salsboro
Direktur: Suardi Guslana M.
Direktur Independen: Nahanng Sitawanto

C. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat telah dihadiri oleh minimal sebanyak 50.305.152,933 (lima puluh miliar lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham, atau mewakili kurang lebih sejumlah 91,25% (delapan puluh satu koma lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 61.675.611,883 (enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sebelas puluh satu) lembar saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan per tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan pukul 18.15 WIB.

- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
- Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Partisipan:
- Selama Rapat berlangsung, tidak terdapat pengajuan dari Pemegang Saham sehubungan dengan Mata Acara Rapat.
- Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yaitu:

Table with 4 columns: Mata Acara, Selesai, Tidak selesai, Abstain. It lists resolutions for Mata Acara Pertama through Mata Acara Keluhur, showing the number of votes for each outcome.

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK 13/2014, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hartanto, Grcs, Karunawan sebagaimana diawali di bawah Kepaniteraan Nomor: 0004/B/1000/AL/15/009/12-21/18/2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan pendapat "Wajar Dalam Semula Hal yang Materiil", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (audit at or charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam ketentuan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Kedua:
1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp47.1257.606.201,- (empat ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu tiga ratus satu Rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
- Dividen tunai sebesar Rp 34.251.821.665,- (sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua) atau 20% dari laba bersih.
- Cadangan Wajib sebesar Rp3.252.882.815,- (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu) atau 5% dari laba bersih.
- Cadangan Lainnya sebesar Rp3.353.443.296.226,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh enam Rupiah) atau 75% dari laba bersih untuk menambah modal.

2. Menyetujui Membagikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya tarif untuk Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2018 serta menetapkan besarnya gaji honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
2. Paik pengesahan atas tandem dibebaskan pada penerima dan tidak dibebaskan sebagai biaya Perseroan.

Mata Acara Keempat:
1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Bambang Karunawan, S.E., Ak, CPA dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hartanto, Grcs, Karunawan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a) Melakukan tinjauan (issu audit) dan pemeriksaan peninjauan lainnya dengan memperhatikan kewajiban serta lingkup pekerjaan audit;
b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik Bambang Karunawan, S.E., Ak, CPA dari KAP Hartanto, Grcs, Karunawan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kuor apabila memang besaran jabatan jasa audit.

Mata Acara Kelima:
Tidak ada pemungutan suara untuk Mata Acara Kelima.
Dibaca Rapat, Direksi Perseroan telah menyetujui Laporan Realisasi Penganggaran Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Oligasi Berkelanjutan PP Properti Tahap I Tahun 2018 dan Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan mengenai realisasi penganggaran dana tersebut kepada OJK melalui surat Nomor: 069/EXT/PP-PROP/2019 tanggal 15 Januari 2019. Untuk Mata Acara Kelima tidak diperlukan pemungutan suara dan persetujuan Rapat karena hanya bersifat laporan.

Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 dan perubahan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diuraikan.
2. Menyetujui untuk menunjuk kembali seluruh anggota dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan penunjukan anggota dasar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menunjuk kembali seluruh anggota dasar tersebut dalam Akta Notaris Jember selaku pemegang penunjukan dan pemberitahuan atas persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh:
1. Mengajukan pemberitahuan dengan hormat nama - nama dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a) Membeberatkan dengan hormat Sdr. Lukman Hidayat sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
b) Membeberatkan dengan hormat Sdr. Mohammad Farida sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan alasan rekrutasi sehubungan dengan kelahiran Perseroan, terhitung sejak 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas), dengan ucapan terima kasih atas sumbangsih yang dalam pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengajukan nama - nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
a) Sdr. Abdul Haris Tatang sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
b) Sdr. Graha Yudha Andarano Putra Pratama sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas) dan berakhiri masa jabatan Sdr. Abdul Haris Tatang sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Sdr. Graha Yudha Andarano Putra Pratama sebagai Komisaris Independen Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-6 (enam) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bawah Pasal Modal dan tanpa menguraikan hal-hal.
Dengan adanya pemberitahuan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama: Abdul Haris Tatang
Komisaris: Betty Aritua
Komisaris Independen: Koki Wirawan Wahyu Widodo
Komisaris Independen: Graha Yudha Andarano Putra Pratama

3. Membeberatkan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Dewan Komisaris tersebut dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, membeberatkan dan menandatangani kepada pihak yang berwenang sebagaimana diperlukan atas perubahan Dewan Komisaris tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Table with 3 columns: NO., KETERANGAN, and TANGGAL. It lists the schedule for dividend distribution from April 18 to April 24, 2019.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:
Tata cara pembagian Dividen Tunai:
Dividen Tunai akan dibagikan sebesar Rp1,53 per lembar saham kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 23 April 2019 sampai dengan pukul 18.15 WIB dengan pemilih saham Perseroan pada sub rekening atas PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 23 April 2019.

Bagi Pemegang Saham yang sahnya dimasukkan dalam pemilihan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan ditransferkan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Mei 2019. Bagi pemegang saham yang tidak dimasukkan dalam pemilihan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Bank Kustodian rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahnya KSEI dimasukkan dalam pemilihan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Warga Didan Negeri yang berakumulasi badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT BSR Indonesia ("BSR") dengan alamat Komplek Parklandan ITC Romy Mas Blok E1 No. 10 - 11, Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta 10150 Telp: 021 - 6317026, Fax: 021 - 6317027, paling lambat tanggal 23 April 2019 pukul 18.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Wajib Pajak Didan Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perundang-Perundangan Penghindaran Pajak Berganda ("PPh") sebesar memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Penghasilan - Undang-Undang Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyempurnaan form DGT - 1 atau DGT - 2 yang akan dipapilasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pusat/ Kantor Pelayanan Pajak Prataman Musuk Burea kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 23 April 2019 pukul 18.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang diberikan akan dikenakan PPh Pasal 25 sebesar 20%.

Jakarta, 12 April 2019

Direksi Perseroan

www.pp-properti.com

